

**IMPLEMENTASI DANA DESA TERHADAP
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19
DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG**

Anang R.Jatmiko¹, Mohamad Fathur Rohman², Masruroh³

anangjtmk@gmail.com, rohmanfatkur105@gmail.com, bagongbebeb@gmail.com
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum

Jombang

ABSTRACT

Pemerintah membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 yang ada di kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif karena. Pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini.

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat kontribusi dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran dan dampak yang di timbulkan dari BLT Dana Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan sudah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membantu perekonomian warga akibat virus Covid - 19.

Kata Kunci : Implementasi, BLT-DD, Covid-19

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang diatur untuk mendukung pembangunan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada daerah pedesaan untuk mengelola urusan daerahnya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan dan pembangunan pedesaan. Meskipun demikian, kendala-kendala masih terjadi dalam proses pembangunan, terutama terkait dengan keterlibatan masyarakat dan efektivitas program-program pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan bagi berbagai program pembangunan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLT, juga dikenal sebagai Bantuan Penghidupan Dasar, adalah jenis bantuan keuangan yang diberikan langsung kepada individu atau keluarga dengan tujuan mengurangi konsekuensi ekonomi atau sosial tertentu. Pemerintah dapat menggunakan BLT sebagai sarana untuk mengatasi situasi darurat atau krisis ekonomi, seperti yang terjadi dalam konteks pandemi COVID-19.

Namun, meskipun BLT memiliki potensi untuk memberikan dampak positif, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, yang dapat mengurangi motivasi untuk mencari solusi jangka panjang terhadap masalah kemiskinan. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program BLT juga dapat menghambat efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks penggunaan Dana Desa, BLT juga menjadi salah satu program prioritas. Dana Desa merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada pemerintahan desa oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Pada tahun 2018, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) mendapat prioritas dalam penggunaan Dana Desa, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Program PKTD dirancang untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur lokal. Dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber daya alam yang tersedia, program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks pandemi COVID-19, PKTD diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk memulihkan ekonomi masyarakat pedesaan yang terdampak.

Namun demikian, keberhasilan implementasi PKTD tidak terlepas dari dinamika masyarakat setempat dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi PKTD di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, dengan fokus pada keberhasilan, kendala, dan dampak positif yang dihasilkan oleh program tersebut.

Dengan menggunakan parameter-parameter kunci seperti inklusivitas program, kecepatan pelaksanaan, transparansi, dampak ekonomi, dan adaptasi terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi PKTD dalam memulihkan ekonomi masyarakat pedesaan pasca-pandemi COVID-19. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

LANDASAN TEORI

Definis Implementasi

Implementasi adalah tahapan kunci dalam menjalankan suatu konsep atau rencana dalam praktik. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata, dengan mengelola sumber daya yang diperlukan. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan. Perubahan sering terjadi selama implementasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan serta fleksibilitas menjadi kunci keberhasilannya. Keseluruhan, implementasi merupakan fase penting dalam mewujudkan tujuan, dan keberhasilannya tergantung pada perencanaan yang matang dan manajemen sumber daya yang efektif.

Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan layanan publik, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar desa. Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2018 mengatur pengelolaan Dana Desa, termasuk penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 mengatur perhitungan Dana Desa berdasarkan jumlah desa dan alokasi yang

berkeadilan. Prioritas penggunaan Dana Desa harus berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan kewenangan desa. Dana Desa juga harus mendukung partisipasi masyarakat, swakelola, dan berkelanjutan. Implementasi program Dana Desa didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur otonomi desa, pendanaan, dan program prioritas, dengan dasar hukum yang jelas seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004 yang mengakibatkan pengurangan subsidi minyak. Pada saat itu, subsidi minyak merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Namun, dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, pemerintah terpaksa mengurangi subsidi minyak secara bertahap. Pengurangan subsidi minyak tersebut dimulai pada tahun 2005 dan berlanjut hingga tahun 2008. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan harga bahan bakar di dalam negeri meningkat secara signifikan, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Untuk mengurangi dampak buruk dari kenaikan harga tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan memperkenalkan program BLT atau BLSM.

Program BLT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai bagian dari janji pemerintah setelah pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat umum yang terdampak kenaikan harga minyak, dengan harapan dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi. Program ini berlangsung dari Oktober 2005 hingga Desember 2006, dan dilaksanakan tanpa syarat kepada sekitar 19,2 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Selain itu, program BLT juga kembali dilaksanakan pada tahun 2008 sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut. Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai lebih dari US\$ 120 per barel membuat pemerintah kembali menggelar program BLT untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Program ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008.

Pada tahun 2013, pemerintah kembali menawarkan bantuan serupa dengan nama baru, yaitu Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain BLT dan BLSM, pemerintah juga mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan bersyarat untuk pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Program ini difokuskan pada ibu hamil dan rumah tangga mampu yang memiliki anak usia 0-15 tahun.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program BLT, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur persyaratan penerima, jumlah bantuan, proses distribusi, serta prosedur validasi data. Program BLT juga digunakan dalam situasi darurat atau krisis seperti pandemi COVID-19 sebagai upaya membantu kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Meskipun program BLT telah memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan, peraturan dan ketentuan terkait program ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan yang ada. Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar program BLT dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Pekerjaan padat karya merupakan strategi pembangunan yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial di banyak negara, terutama di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberdayakan mereka dengan memberikan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.

Salah satu keunggulan utama dari pekerjaan padat karya adalah fleksibilitasnya dalam menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, di daerah pertanian, program ini dapat mengarah pada kegiatan seperti perbaikan infrastruktur irigasi atau pembangunan saluran air, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat. Di wilayah yang lebih terpencil atau terisolasi, pekerjaan padat karya dapat berfokus pada pembangunan jalan atau jembatan, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dengan pasar dan pusat ekonomi lainnya.

Selain memberikan manfaat ekonomi langsung, program pekerjaan padat karya juga berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan memberikan peluang kerja kepada mereka yang kurang mampu, program ini dapat membantu mengangkat mereka dari garis kemiskinan dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Hal ini pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pekerjaan padat karya juga memiliki dampak positif dalam memperkuat ikatan sosial dan membangun komunitas yang lebih kuat. Melalui kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan lokal, masyarakat dapat belajar bekerja sama, saling mendukung, dan mengatasi tantangan bersama-sama. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam pembangunan, tetapi juga membangun fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Dalam konteks global yang saat ini diwarnai oleh perubahan iklim dan tantangan pembangunan berkelanjutan, pekerjaan padat karya juga dapat berperan sebagai alat untuk mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, program-program ini dapat memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti penanaman hutan, rehabilitasi lahan kritis, atau pengembangan energi terbarukan.

Dengan demikian, pekerjaan padat karya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi peserta program, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, program-program ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Covid-19

COVID-19, atau Penyakit Virus Corona, adalah penyakit yang dapat menimbulkan berbagai gejala dari ringan hingga parah. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar secara global, termasuk di Indonesia. Penularan virus ini dapat terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau melalui droplet yang dihasilkan saat batuk atau bersin. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 menjadi arahan penting dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia, dengan memberikan instruksi kepada berbagai kementerian dan lembaga serta pimpinan daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam merespons krisis kesehatan masyarakat. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kerja sama antar-sektor dalam mengatasi pandemi dan memberikan tanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet untuk memantau pelaksanaannya.

Dampak Ekonomi Dan Struktur Perekonomian Pasca COVID-19

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 merupakan panduan penting dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Instruksi ini menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga dalam mengembangkan kebijakan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit serta krisis lainnya. Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai penyakit, termasuk zoonosis. Sementara itu, Menteri Kesehatan diberi arahan untuk meningkatkan kesiapan kesehatan global dan kerjasama teknis dalam menerapkan regulasi kesehatan internasional.

Dampak ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terasa, seperti PHK besar-besaran, penurunan aktivitas manufaktur, inflasi, dan keterbatasan perjalanan udara. Sektor pariwisata juga mengalami penurunan signifikan, yang berdampak pada tingkat hunian hotel dan bisnis ritel di berbagai destinasi wisata. Pandemi ini juga menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat, dengan meningkatnya belanja daring dan adopsi solusi digital.

Namun, pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomiannya. Fokus pada kesejahteraan sosial dan investasi dalam sektor kunci diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi. Diversifikasi dalam perdagangan dan investasi dalam infrastruktur juga menjadi strategi penting dalam menghadapi dampak pandemi ini.

Selain itu, penanganan kemiskinan juga menjadi fokus dalam pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Upaya untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal, seperti yang diimplementasikan melalui program padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai.

Dengan pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara kemiskinan, pendapatan, dan pemulihan ekonomi, serta implementasi dana desa dalam mendukung upaya pemulihan tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi pasca-pandemi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan analisis komprehensif tentang subjek yang diselidiki. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi melalui penggunaan bahasa deskriptif tanpa menghasilkan analisis statistik atau numerik. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong dan Sugiyono, menganut filosofi postpositivisme dan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan secara sengaja dan melalui snowballing, dengan teknik triangulasi untuk memverifikasi keakuratan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Tunai Kerja Desa (PTKD) pascapandemi COVID-19. Triangulasi, sebagai metode verifikasi keakuratan data, digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan sumber data dan teknik dari berbagai sumber dan peneliti.

Objek/Subjek Penelitian

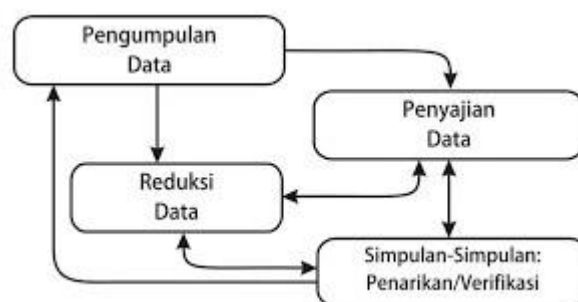
Skripsi ini meneliti implementasi Dana Desa, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Fokus utamanya adalah pada alokasi dana, jenis kegiatan PKTD dan BLT, serta peran pemerintah desa dalam mendorong pemulihan ekonomi. Penelitian akan mengevaluasi efektivitas program, pandangan masyarakat penerima manfaat, dan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Melibatkan Pemerintah Desa, Bappeda, dan masyarakat penerima manfaat, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang implementasi Dana Desa dan program pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan yang bersifat kualitatif. Pertama, akan dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, anggota Badan Perencanaan Pembangunan Desa (Bappeda), serta masyarakat penerima manfaat Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wawancara mendalam ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait implementasi program dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, observasi partisipatif juga akan dilakukan, di mana peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan terkait program PKTD dan BLT di masyarakat. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung tentang pelaksanaan program dan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, analisis dokumen juga akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder terkait alokasi dana, kebijakan, dan dokumen resmi terkait implementasi Dana Desa dan program pemulihan ekonomi di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan data yang terkumpul dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pelaksanaan program serta dampaknya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat setempat.

Analisis Data



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat langkah utama. Pertama, adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh mencakup berbagai aspek, seperti data demografis desa, implementasi program, pengeluaran untuk program PKTD dan BLT, dampak ekonomi pada masyarakat desa, evaluasi dari pemangku kepentingan terkait, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dana desa serta program PKTD dan BLT. Kedua, adalah reduksi data, di mana data disempurnakan, diorganisir, dan unsur yang tidak relevan dihilangkan. Langkah ini mencakup identifikasi parameter utama, penggolongan data berdasarkan kategori yang relevan, dan eliminasi data yang tidak diperlukan. Ketiga, adalah penyajian data, yang melibatkan pengorganisasian informasi dalam bentuk naratif yang memudahkan pengambilan kesimpulan. Terakhir, adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan dari penelitian diinterpretasikan dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, teknik analisis data ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan mendalam, sehingga mendukung pemahaman yang holistik terkait implementasi Dana Desa dan program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bantuan Langsung Tunai

PMK No. 50 Tahun 2020 adalah kebijakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan investasi di sektor-sektor tertentu di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini memberikan insentif pajak berupa PPh Final kepada perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor yang telah ditentukan. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi memikirkan kewajiban pajak tambahan di masa depan terkait dengan penghasilan dari investasi mereka, memberikan kepastian pajak kepada investor dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil. Selain mendorong investasi, PMK ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor industri di Indonesia dengan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama selama masa pandemi COVID-19, ketika sektor ekonomi terdampak dan investor ragu untuk berinvestasi, kebijakan ini menjadi stimulus penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Sementara PMK No. 7 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur tata kelola dana desa dengan rinci. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan yang tepat, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi dalam pembangunan di tingkat lokal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara penggunaan dana desa, prosedur pelaporan, hingga mekanisme pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa diatur dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. PMK ini memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan dan menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, PMK juga mengatur tentang kewajiban pelaporan secara berkala mengenai penggunaan dana desa agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan memastikan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. PMK ini juga menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat bagi pemerintah desa untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, PMK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa secara lebih baik.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa setelah dilakukan pendataan untuk mengidentifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Kecamatan Kudu, selanjutnya bantuan tersebut diberikan kepada penerimanya. Pencairan bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai di lingkungan masing-masing kantor Desa, sesuai pedoman kesehatan. Keputusan penyaluran uang tunai ini diambil setelah melakukan diskusi kolaboratif karena diputuskan bahwa bantuan tunai akan memudahkan proses bagi masyarakat, meningkatkan transparansi bagi seluruh penerima BLT Dana Desa, dan mendorong pendekatan yang lebih inklusif secara sosial.

Berdasarkan penjelasan menyeluruh yang diberikan, peneliti menilai bahwa cara penyaluran BLT di kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Panitia memastikan penyaluran bantuan tetap berpegang pada prinsip keadilan yang dituangkan dalam hukum syariah. Hal ini dicapai dengan melakukan seleksi secara cermat, mengutamakan kebenaran, ketepatan waktu, dan memantau program secara ketat.

Alokasi uang tunai merupakan hasil keputusan kolektif yang diambil dalam musyawarah desa, karena hal ini memfasilitasi berfungsinya masyarakat. Panitia program bantuan dengan tekun berpegang pada kaidah syariat, karena Allah maha tahu tentang amal shaleh dan maksiat umat manusia. Untuk meningkatkan efektivitas program BLT pada tahun

depan, penting untuk memastikan keselarasan program tersebut dengan tujuan dan kebijakan pemerintah.

Implementasi Padat Karya Tunai Desa

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat pedesaan, terutama mereka yang tergolong sebagai masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan gizi buruk. PKTD dirancang untuk memberikan pekerjaan sementara kepada individu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dengan harapan bahwa mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan sambil menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih permanen. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, PKTD difokuskan pada dua aspek utama: pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian komunal. Pembangunan infrastruktur mencakup berbagai bidang, seperti penggunaan air irigasi (P3TGAI), pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, pemeliharaan jalan rutin, dan sebagainya. Misalnya, di beberapa desa, PKTD digunakan untuk memperbaiki sistem irigasi yang sudah ada atau membangun infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Sementara itu, dalam aspek perekonomian, program ini berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, baik manusia maupun sumber daya alam, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada penduduk desa, mendukung usaha kecil dan menengah, atau mengembangkan potensi pariwisata lokal.

Di Kabupaten Kudu, PKTD diimplementasikan dengan harapan dapat merangsang kegiatan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa tantangan muncul. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penyelarasan perencanaan desa, terutama terkait dengan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menuntut upaya penyesuaian dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa program PKTD dapat berjalan sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya, pemerintah desa perlu mereview kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar lebih sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Desa untuk PKTD.

Selain itu, masalah skill atau keahlian pekerja juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PKTD. Meskipun program ini berusaha memberikan peluang kerja kepada berbagai lapisan masyarakat, seringkali rekrutan yang dilakukan tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hasil pekerjaan dan efektivitas program secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu meningkatkan proses seleksi tenaga kerja serta memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang terlibat dalam program PKTD.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal sangatlah penting. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan yang jelas dan mendukung dalam pelaksanaan program PKTD, sementara pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu aktif terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan program ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Di sisi lain, masyarakat lokal juga perlu didorong untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program, baik sebagai peserta maupun pengawas, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program PKTD dalam jangka panjang.

Faktor keberhasilan Bantuan Langsung Tunai dalam Mengatasi Kemiskinan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan di banyak negara. Melalui pemberian bantuan finansial langsung kepada rumah tangga miskin, BLT tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga memberikan stimulus ekonomi yang signifikan serta berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Keberhasilan BLT sebagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial sangat tergantung pada beberapa faktor kunci. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti efektivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, stimulus ekonomi, pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta efektivitas sistem pengelolaan dan distribusi menjadi kunci dalam menjalankan program BLT secara sukses.

Dengan memahami dan mengimplementasikan faktor-faktor ini dengan baik, BLT dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam konteks penelitian di Kecamatan Kudu, terdapat beberapa faktor kunci yang telah teridentifikasi sebagai penentu keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT):

1. **Sistem Identifikasi Penerima yang Efektif**
Penelitian di Kecamatan Kudu menunjukkan bahwa faktor keberhasilan utama BLT adalah adopsi sistem identifikasi penerima yang efektif. Sistem tersebut mampu dengan cepat dan akurat mengidentifikasi rumah tangga miskin yang membutuhkan bantuan, memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang tepat sasaran.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan**
Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program BLT. Proses penyaluran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan memberikan keyakinan kepada penerima dan masyarakat bahwa bantuan dikelola dengan baik. Pada bagian ini, peneliti akan melampirkan dokumen foto sebagai bukti atau ilustrasi yang mendukung temuan dan analisis yang telah disajikan sebelumnya yaitu mengenai transparansi
3. **Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan**
Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kudu menegaskan bahwa pentingnya adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam menilai kinerja program BLT. Dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus, program dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengadaptasi strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.
4. **Kemitraan dan Kolaborasi yang Kuat**
Hasil penelitian menyoroti bahwa kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi BLT. Kolaborasi yang efektif memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang dapat meningkatkan efisiensi program.
5. **Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan faktor yang mendorong keberhasilan BLT. Pentingnya memperlakukan penerima dengan hormat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan bahwa program tidak menimbulkan diskriminasi atau marginalisasi.

Faktor keberhasilan Padat Karya Tunai Desa dalam Mengatasi Kemiskinan

PKTD menawarkan solusi yang holistik dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Melalui pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, PKTD tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan program ini bergantung pada

beberapa faktor kunci yang saling terkait, mulai dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, partisipasi aktif masyarakat, pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal, hingga kapasitas pengelolaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor ini, PKTD dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan akses terhadap pekerjaan, dan merangsang pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan dari Program PKTD:

1. Kolaborasi dan Dukungan Multisektor

Keberhasilan PKTD didorong oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan mitra pembangunan lainnya. Dukungan yang kuat dari berbagai sektor memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, dan implementasi program yang lebih efektif.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan PKTD sangat penting. Ketika masyarakat merasa memiliki program dan memiliki peran aktif dalam menjalankannya, keberhasilan program cenderung lebih tinggi karena adanya tanggung jawab bersama dan motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan.

3. Pemahaman Mendalam tentang Kebutuhan Lokal

Keberhasilan PKTD bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setiap desa yang dilayani. Pendekatan yang disesuaikan secara lokal memungkinkan program untuk lebih tepat sasaran dan relevan dengan konteks masing-masing desa.

4. Keterpaduan Antara Program dan Kebijakan

PKTD harus terkait erat dengan kebijakan pembangunan yang ada dan strategi nasional atau regional yang lebih luas. Keterpaduan ini membantu memastikan bahwa program tidak hanya beroperasi secara terpisah, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan yang lebih besar.

5. Kapasitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Program

Keberhasilan PKTD juga bergantung pada kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan program yang kuat. Pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis yang memadai untuk staf program dan para pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan baik.

6. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Proses evaluasi yang terus-menerus dan pembelajaran dari pengalaman adalah faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PKTD. Menganalisis hasil, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan merupakan langkah penting dalam menjaga relevansi dan dampak positif program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan teori pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi BLT dan PKTD di Kecamatan Kudu dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa sudah mencapai tingkat optimal, terbukti dengan terpenuhinya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
 - b. Program BLT Dana Desa di Kecamatan Kudu terbukti efektif karena memenuhi kriteria ketepatan pilihan, sasaran, waktu, dan pemantauan program yang berdampak positif secara nyata bagi masyarakat.

- c. Dampak positif dari BLT terasa dalam berbagai aspek, termasuk perasaan, lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat, yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum.
 - d. BLT berhasil memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga membantu dalam menjaga aspek-aspek penting seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi mencapai keberhasilan jangka panjang.
 - e. Program ini menjadi salah satu contoh sukses dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui skema padat karya tunai dan pemberian bantuan langsung yang tepat sasaran.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- a. Sistem Identifikasi Penerima yang Efektif: Adopsi sistem identifikasi penerima yang efektif merupakan faktor kunci keberhasilan BLT, memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada rumah tangga miskin yang tepat sasaran.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan: Keberhasilan program BLT ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan, yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa bantuan dikelola dengan baik.
 - c. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan penting dalam menilai kinerja program BLT, memungkinkan identifikasi perbaikan dan adaptasi strategi untuk meningkatkan efektivitas.
 - d. Kemitraan dan Kolaborasi yang Kuat: Kolaborasi efektif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi BLT, memperkaya pertukaran pengetahuan dan sumber daya.
 - e. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia: Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi pendorong keberhasilan BLT, memastikan perlakuan yang hormat dan penghormatan terhadap hak-hak penerima tanpa adanya diskriminasi atau marginalisasi

Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat implementasi dan dampak dari kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Kecamatan Kudu:

1. Meningkatkan efektivitas PKTD dengan mengembangkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Diversifikasi program PKTD menjadi penting, termasuk pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk pengembangan usaha kecil, sehingga peserta program memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dan mengakses peluang pekerjaan jangka panjang.
2. Memperluas dukungan bagi penerima BLT Dana Desa dengan mengintegrasikan program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Perlu juga diperkenalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan BLT Dana Desa disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan digunakan secara efektif.
3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BLT Dana Desa dengan penguatan monitoring dan evaluasi program secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui membangun sistem pemantauan yang terintegrasi dan terukur serta evaluasi program secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan dampak nyata yang dirasakan oleh penerima bantuan.

Diharapkan dengan implementasi saran-saran di atas, program PKTDD dan BLT Dana Desa dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kudu pasca pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib. (2020). *Padat Karya Tunai Desa*. Deepublish.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Fanisa, B., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 19, 271–282. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p271-282>
- Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *DuPsyCouns: Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Konseling*, 2(1), 146–153. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423>
- HS, H. K., Amrullah, Salahuddin, M., Muslim, & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Manembu, R. R. (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik*, 12(2), 1–21.
- Mariam, S., Ekawati, R., & Sujatmiko, A. (2022). Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Public Power*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6104>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi)*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gajah Mada University Press.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fityani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Socilal Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Putri, R. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Rahmawati, Y. D., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk

- Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Saraswati, E., Nomaini, F., & Sobri, K. M. (2021). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Potensi Bumdes Pada Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa Di Masa Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 49–59. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1629>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Suharso, & Retnoningsih. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.
- Susanto, E. (2022). Peran Pemerintahan Desa/Nagari Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Masalah Pandemi Covid-19 Di Nagari Galugua. *Social Science NCSSR And Religion*, 823–828. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7210%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7210/2859>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>